

**ANALISIS KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH

EKA KURNIAWATI

E12111273

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

yang diajukan oleh

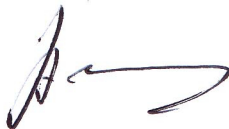
EKA KURNIAWATI

E121 11 273

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 13 Mei 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H.A. Gau Kadir, MA
NIP. 19500117 198003 1 002

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi
Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlina, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Eka Kurniawati

E 121 11 273

telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2015,

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Sekretaris	: Rahmatullah, S,IP,M,Si
Anggota	: A. Murfi, S.Sos, M.Si
Anggota	: Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
Anggota	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
Pembimbing I	: Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Pembimbing II	: Rahmatullah, S,IP,M,Si

()
()
()
()
()

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayah-NYA, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Electronic Government di Kabupaten Polewali Mandar “ ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.

Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

- Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina N.K., M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
- Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.si selaku Dekan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya atas bantuan dan kerja samanya.
- Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas.
- Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
- Para Dosen dan staf akademik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
- Kepada bapak Dr.H.A Gau Kadir, MA selaku penasehat akademik dan pembimbing I yang telah dengan sungguh-sungguh, tulus, dan sepenuh hati membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. Kepada bapak Rahmatullah, S.Ip, M,Si selaku pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
- Ayahanda H. Abd. Munir dan Ibunda Hj. Fatmah terkasih atas seluruh dukungan, perhatian, dan setiap doa yang kalian panjatkan. Kalian

adalah penyemangat disetiap langkah yang aku pijakkan dalam mengarungi kehidupan.

- Untuk seluruh teman-teman angkatan keluarga kecilku Enlightenment 2011 Iping, Adit, Andis, Padul, Unci, Hendri, Adi, Fauzi, Awwing, Gusti, Hugo, Rijal, Ulla, Same, Hilal, Dodo, Irul, Heri, Gilang, Bunda Momoy, Amril, Arman, Ade, Ono, Dewi, Gadis, Nila, Wulan, Endi, Delfa, Cece, Upi, Indri, Eki, Novi, Teman seperjuangan yang bureng-bureng, ati, anti, uni, ummu, wana, sholeha, unya, tenri, dan novi. Semoga perjuangan kita mendapat hasil yang sesuai diharapkan. Banyak yang kita lalui bersama baik itu suka maupun duka, tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara kita yang kadang membuat emosi naik-turun, tapi saya yakin itu menjadikan kita lebih mengenal karakter masing-masing dan semoga kita tidak akan pernah saling melupakan satu sama lain. Intinya kalian semua adalah saudara – saudari yang terbaik yang pernah Allah berikan ke kehidupanku. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN !!!
- Untuk Paduan Suaraku tercinta D'B3 Voice Fisip Unhas terima kasih telah menjadi keluarga kecilku berbagi ilmu, pengalaman, kebersamaan serta rasa kekeluargaan yang pernah saya rasakan bersama kalian. For you my Spesial Conductor A. Mahazir Thamrin (kakak achie) dan kakak elis ku yang baik hati. Love you all.

- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP UNHAS. Respublika '06, Renaissance '07, Glasnost '08, Aufklarung '09, Volkgeist '10, Enlightenment '11 Fraternity '012, Lebensraum '013, Fidelitas '014. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan kekeluargaan kalian. Jayalah Himapemku Jayalah Himapem kita
- Kanda – kandaku Respublika '06, Renaissance '07, Glasnost '08, Aufklarung '09, Volkgeist '10, Enlightenment '11 serta dinda – dindaku Fraternity '012, Lebensraum '013, Fidelitas '014. Salam Merdeka Militan.
- Keluarga besar Ekstrakurikuler Pencak Silat Panca Suci Fisip Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan beserta rasa kekeluargaan yang pernah saya rasakan bersama kalian.
- KKN Regular Unhas Gel.87 Desa Poleonro Kec. Lamuru Kab. Bone Kak anto (Kordes Poleonro), Kak dika, liber, adi, icha, kurnia, eka. Makasih banyak sudah menjadi saudara baru saya selama menjalani KKN kurang lebih 2 bulan, masa-masa bersama kalian sungguh sangat menyenangkan dan sangat berkesan yang tak pernah terlupakan dalam hidup saya. Tak lupa juga buat bunda Hj. Rosmini dan bapak H. Sakir sekelurga yang telah menjadi keluarga baru kami selama KKN, pak desa dan ibu desa , dan bapak supervisor kami.

- Untuk kekasih yang paling the best **Ahmad Rosandi Sakir** yang senantiasa menemani dan memberikan waktu, doa, dukungan, dan pengorbanannya selama ini . I Love You.
- Untuk saudaraku Agum Gunaedi dan Muh. Rezki Fajar terima kasih atas dukungan dan motivasi kepada penulis. Salam sayang untuk kalian.
- Dan terima kasih kepada seluruh informan atas kesediaan dan waktunya memberikan informasi kepada penulis untuk kepentingan penelitian skripsi ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan, penulis doakan semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang setimpal serta senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Makassar, Mei 2015

Eka Kurniawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan tentang Teori Analisis.....	12
2.2 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan.....	15

2.3 Tinjauan tentang Electronic Government	37
2.4 Kerangka Konseptual	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Lokasi Penelitian	62
3.2 Tipe Penelitian	64
3.3 Jenis Data	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5 Informan.....	65
3.6 Analisis Data	65
3.7 Definisi Operasional	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
4.1.1 Letak Geografis Wilayah.....	71
4.1.2 Kependudukan	73
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya.....	75
4.1.4 Visi Misi Pemerintah Kab Polewali Mandar.....	78
4.2 Penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar	86
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dalam Lingkup Pemerintah Polewali Mandar	91

4.3Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerapan Kebijakan electronic government	112
 BAB V PENUTUP	 123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1.1	Luas daerah, persentase luas terhadap luas Kabupaten dan jumlah Kelurahan/Desa dirinci per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014	72
4.12	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, dan Kepadatan penduduk dirinci per kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014.....	74
4.1.3	Jumlah Sekolah/Perguruan Tinggi, Jumlah Murid/Mahasiswa, dan jumlah guru/dosen per jenjang pendidikan tahun 2014.....	76
4.7	Jumlah aparatur Dishub Kominfo Polewali Mandar menurut tingkat pendidikannya.....	78

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Skema Kerangka Konseptual	61
2	Jaringan Internet pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar diawal Perkembangannya pada Tahun 2003.....	98
3	Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar	70

INTISARI

Eka kurniawati. E121 11 273. Analisis Penerapan Kebijakan Electronic Government Di Kabupaten Polewali Mandar. Dibimbing oleh Pembimbing I, Dr. H. A. Gau Kadir, MA, dan Pembimbing II, Rahmatullah, S.IP,M.Si

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pemahaman penulis bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah sepatutnya dapat menyelenggarakan pelayanan berbasis *E-Government* sebagai media dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal serta efektif dan efisien. Namun, beberapa data yang diperoleh penulis mengemukakan bahwa penerapan *E-Government* di Kabupaten Polewali Mandar masih belum maksimal, dilihat dari beberapa kekurangan seperti masih kurangnya tenaga ahli dalam bidang TIK dan upaya penerapan *E-Government* ini masih diterapkan sendiri-sendiri oleh institusi atau SKPD yang ada di lingkup Kabupaten Polewali Mandar.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan *E-Government* dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *E-Government* di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. Lama penelitiannya sekitar 1 bulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan berbasis *E-Government* di Kabupaten Polewali Mandar yakni adanya Sistem Informasi Manajemen yang sudah dikelola oleh Organisasi Tata Laksana Setda Polewali Mandar dimana Sistem Informasi Manajemen telah dikembangkan saat ini.

Kata kunci : *E-Government*

ABSTRACT

Eka Kurniawati. E121 11 273. Analysis of Application of Electronic Government Policy In Polewali Mandar. Guided by the Supervisor I, Dr. HAGau, MA, and Supervisor II, Rahmatullah, S.IP, M.SI

This research is motivated by the author's understanding that the Government has been duly Polewali Mandar can organize based E-Government service as public service media in realizing the maximum and effective and efficient. However, some of the data obtained by the authors suggested that the implementation of E-Government in Polewali Mandar still not up, judging from some shortcomings such as the lack of experts in the field of ICT and the implementation of E-Government effort is still applied individually by the institution or SKPD in the scope of Polewali Mandar.

In general, this study aims to describe the implementation of E-Government and the factors that affect the implementation of E-Government in Polewali Mandar. This study used a qualitative descriptive type. Data collection instruments are interviews and observations on location and also based on documents. Peneltiannya about 1 month old. Data analysis techniques in the study conducted qualitatively.

The results showed that there were already based E-Government implementation in Polewali Mandar namely the Management Information System that has been managed by the Organisation Secretariat Procedure Polewali where Management Information System has been developed at this time.

Keywords : E-Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Sulit dibayangkan kehidupan manusia modern sekarang ini dipisahkan dari informasi. Pengelolaannya pun semakin canggih dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan sehingga menampilkan wajah industrial yang mengarah pada komersial. Proses produksi pengolahan dan penyebarluasan informasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang semakin canggih. Dunia saat ini sedang mengalami proses perubahan sosial yang sangat cepat. Masyarakat dunia semakin terhubung antara satu dengan yang lain. Dampak dari itu, informasi telah menjadi komoditas penting dan strategis yang semakin diperlukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama

dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Sulit dibayangkan bagaimana kehidupan manusia modern sekarang ini jika dipisahkan dari teknologi informasi.

Pada saat yang sama, Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis. Implikasi dari itu adalah diberikannya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini sistem hirarki harus dikembangkan menjadi sistem jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan dan terpercaya. Pembaharuan berbagai kebijaksanaan pemerintah diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah, sehingga pada gilirannya daerah dapat meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dan melanjutkan kesinambungan pembangunan.

Mengingat daerah akan menjadi pusat kegiatan pembangunan dan ekonomi, maka tugas, fungsi dan peranan pemerintah daerah didalam mengelola daerahnya akan semakin kompleks dan meningkat seiring dengan derasnya arus informasi diberbagai bidang kegiatan pembangunan dan investasi. Oleh sebab itu, agar tercipta keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang lebih partisipatif, maka Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peranan strategis yang sangat diperlukan untuk dapat mengakses keterhubungan informasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antar daerah, dunia usaha dan sektor sektor lainnya.

Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk didalamnya suksesnya mangakselerasi penyelenggaraan otonomi daerah akan ditandai dengan berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini akan sangat ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menangani tugas tugasnya berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik (good governance).

Untuk mengembangkan sistem manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka /pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju Elektronik Government (e-gov).

E-government merupakan sebuah model pengembangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Dengannya diharapkan tercipta pemerintahan yang responsive terhadap keinginan masyarakat, memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, seperti KTP online, pajak online, perijinan online dll, transparan, serta tetap menjaga akuntabilitasnya. Sementara itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya dengan memberikan kontribusi positif berupa pendapat, pengetahuan atau pemikiran melalui website resmi pemerintahan. Dalam website resmi pemerintah dapat dijadikan ajang tukar pendapat, pemikiran dan diskusi antara masyarakat dan pemerintahnya. Melalui website ini juga akan terbuka kesempatan bagi mereka warga masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal atau tengah melaksanakan tugas diluar negeri, untuk ikut serta menyumbangkan ilmu pengetahuannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya dan pengalaman selama mereka berada diluar negeri untuk pembangunan dan pengembangan daerahnya.

Melalui pengembangan e-gov, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan cara: mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi; membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu serta menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip – prinsip dasar yang universal namun karena setiap Negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam. Aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi. Penerapan e-Government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan. E-gov dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. E-gov juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi

birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-gov adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

Penerapan kebijakan Electronic Government sudah tertuang dalam Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 “*Tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*” mengatur dengan jelas bahwa :

“Pengembangan sistem informasi manajemen dalam efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka e-government secara menyeluruh dan integrasi dilingkungan pemerintah kabupaten Polewali Mandar.”

Dan Peraturan Bupati nomor 26 Tahun 2014 tentang “*Tata kelola electronic government di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*”. Mengatur dengan jelas bahwa :

“Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi – fungsi strategis pemerintahan dan pembangunan, perlu tata kelola system informasi manajemen dalam kerangka electronic government secara

menyeluruh dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.”

Kebijakan penerapan teknologi komunikasi dan informasi (*information Communication Technology / ICT*) di Indonesia juga tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 2003 tentang “*kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government*” . Antara lain:

Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan layanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan *dengan* interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal

pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting* yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.

Dan Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Dengan kebijakan tersebut membuka pemanfaatan secara luas, peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi kemasyarakat menggunakan media baru atau internet dapat meningkatkan layanan public yang efektif dan efisien. Dalam

pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman. Keserempakkan tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsure kelembagaan pemerintah.

Pada dasarnya, terdapat banyak sekali cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari meningkatkan partisipasi masyarakat hingga melakukan reformasi birokrasi. Namun, salah satu cara yang paling relevan di era globalisasi seperti saat ini ialah dengan menerapkan Pemerintahan Elektronik atau yang lebih populer dengan sebutan *e-government*. Keberadaan *e-government* di era globalisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

E-government akan terwujud dengan baik jika komponen bangsa, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat menciptakan sebuah hubungan kerja sama yang baik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pengembangan e-government di Kabupaten Polewali Mandar, dan akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Analisis Penerapan Kebijakan Electronic Government di Kabupaten Polewali Mandar”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang akan dilaksanakan atas bidang ilmu pemerintahan, tujuan penelitian ini antara lain :

- Untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan electronic government di kabupaten polewali mandar
- Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang E-government. Serta dapat juga dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam melakukan

kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan penerpan E-government dan kontribusinya terhadap pemerintahan.

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah E-government.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Khususnya Pemerintahan Daerah Polewali Mandar dalam rangka membangun sistem E-government yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual-teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori tentang analisis, implementasi kebijakan, dan elektronik government

2.1 Tinjauan tentang Teori Analisis

Analisis dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk analisis yang merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

Analisis juga dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang untuk kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Kamus besar bahasa indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

Anne gregory, analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan.

Dwi prastowo darminto & rifka julianty, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

Syahrul & mohammad afdi nizar, analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul

Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

Kamus akuntansi, analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul

Komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Minto Rahayu Analisa adalah suatu cara membagi-bagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen; berarti melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

Menurut Yakub, konsep teori Analisa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami kondisi yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business proses), ketentuan atau aturan (business rule), masalah dan mencari solusinya (business problem and business soulution), dan rencana-rencana perusahaan (business plan).

Menurut Mulyato, konsep Analisa sistem adalah teori sistem umum yang sebagai sebuah landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang/mennganti output yang sdang digunakan, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain (biasa jadi lebih sederhana dan lebih interatif) atau melakukan beberapa perbaikan serupa.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa analisis sistem adalah suatu proses sistem yang secara umum digunakan sebagai landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam suatu sistem tertentu.

2.2 Tinjauan tentang implementasi kebijakan

2.2.1 Pengertian implementasi

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai - nilai yang dilakukan melalui tindakan - tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bias dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002:67).

Browne dan Wildavsky (Tacjhan, 2006) mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert (1986) bahwa implementasi merupakan sebuah rekayasa. Pengertian – pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kamus bahasa indonesia implementasi diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan

menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret atau nyata.

Menurut joko widodo (2007), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha mencapai perubahan – perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Charles O. Jones sebagaimana dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003 : 3), dimana implementasi diartikan sebagai *“Getting The Job Done”*. Tetapi dibalik kesederhanaan itu rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan Resource, lebih lanjut merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh keggalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi

yang terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di Negara lain. Setidaknya ada enam factor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu kualitas kebijakan itu sendiri.

Menurut Goggin et al.(1990), kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok : Isi kebijakan (*the content of the policy message*), meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan serta keterlibatan public. Format kebijakan (*the form of the policy message*), meliputi kejelasan kebijakan, konstitusi kebijakan, frekuensi, serta penerimaan isi kebijakan. Reputasi actor (*the reputation of the communicators*) terdiri dari legitimasi dan kredibilitas actor – actor pemerintah daerah.

Rondinelli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat factor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : Kondisi lingkungan (*environmental condition*), Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*), Sumberdaya (*resource*), Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

2.2.2 Pengertian Kebijakan

Secara konseptual konsep kebijakan sering dikonsepsikan dengan terminology “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”.

Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “statemen of intents” atau perumusan keinginan. Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsure pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (power) dan wewenang (outority) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Ketika kita berbicara tentang adanya pengaturan, maka sejumlah teori harus diperlakukan jika menginginkan suatu kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan didasarkan pada landasan teori yang berlaku dan relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak saja dilakukan atas dasar kekuasaan akan tetapi memiliki pembenaran secara teoritis keilmuan. (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012:7)

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah:

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu sambil mencari peluang - peluang untuk mencapai

tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12). ”

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan - tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari - hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan - aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan- aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa:

“ kebijaksanaan memerlukan pertimbangan - pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan - aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan

sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom (Islamy, 1997:5).”

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam Tangkilisan, 2003:5)

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. (dalam Tangkilisan, 2003:2)

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai - nilai masyarakat itu sendiri.

Dalam bahasa Indonesia “kebijakan” merupakan terjemahan dari “policy” dalam bahasa Inggris. Kata tersebut mempunyai akar bijak yang dapat disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata sifat wise dalam bahasa Inggris. Dengan pengertian sifat bijaksana dibedakan orang dari sekedar pintar (clever) atau cerdas (smart). Pintar bias berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sementara cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir

cepat atau dapat menemukan jawaban bagi suatu persoalan yang dihadapi secara cepat. Orang yang bijaksana mungkin tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami hamper semua aspek kehidupan (Said Zainal Abidi, 2002).

Menurut James E. Anderson (Budi Winarno, 2002), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serfangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Edi Suharto (2005) Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat madani atau civil society. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetensi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan – kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara.

Menurut Thomas Dye (1981 : 1) kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan

dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakn public dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan public tersebut dibuat badan pemerintah, bukan orgnisasi swasta
2. Kebijakan public tersebut menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan public. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan public, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai – nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. (Dikutip Dye, 1981).

Dalam studi kebijakan public terdapat du pendekatan, yakni : pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy anaysis*), dan kedua kebijakan public politik (*political public policy*) (Hughes, 1995 : 145). Pada pendekatan pertama, studi analisi kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetrapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model – model

statistic dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistic, dengan melihat interaksi politik sebagai factor penentu dalam berbagai bidang seperti, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan,

Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar – benar rasional menurut pertimbangan untung rugi. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bersih paling optimal.

2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan adalah tindakan - tindakan yang dilakukan pejabat - pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah : “Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. ”(Edward III dalam Winarno, 2007:174). Pendapat dari ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith.

Menurut Smith (1973) (dalam Islamy, 2001:90), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (dalam Islamy, 2001:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, salah satunya yaitu Idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yaitu ; pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan – perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi – asumsi yang sama dengan mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Sementara itu, dalam pendekatan yang diteoremdikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ; Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses

implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya

untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu

program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan

kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keputusan kebijakan yang merupakan sebuah harapan ideal diwujudkan dalam kenyataan melalui implementasi. Terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatannya tercapai.

2.2.4 Tahap – tahap dalam Implementasi Kebijakan

Keputusan kebijakan yang merupakan sebuah harapan ideal diwujudkan dalam kenyataan melalui implementasi. Implementasi

kebijakan public merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan. Terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya terjadi.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap – tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Agustino, 2006) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

a. Tahap pertama

Terdiri atas kegiatan – kegiatan seperti berikut :

- Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- Menentukan standar pelaksanaan;
- Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

b. Tahap kedua

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumberdaya, prosedur, biaya serta metode.

c. Tahap ketiga

- Menentukan jadwal ;
- Melakukan pemantauan ;
- Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera

Sedangkan menurut ahli lain, M. irfan Islamy (Agustini, 2006) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya. Dan bersifat non self – executing yang berarti bahwa suatu kebijakan public perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

2.3 Tinjauan tentang Electronic Government

2.3.1 Pengertian Electronic Government

E-government atau Pemerintahan elektronik (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi

warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *Electronic government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Electronic Government (e-Gov) merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik.

Pengembangan *E-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik.

Tujuan implementasi e-government antara lain meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Selanjutnya, membangun e-government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Electronic Government (e-Gov) di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), melalui ini disampaikan kepada pemerintah, bahwa aparat pemerintah harus menggunakan layanan berbasis teknologi telematik dalam

melaksanakan e-Gov, untuk mendukung *good governance* serta untuk mempercepat proses demokrasi (Andrianto:2007)

Layanan berbasis e-Gov sangat berkaitan dengan pelayanan yang responabilitas cepat, transparan dan bertanggung jawab (accountabel). Transparansi publik adalah suatu keerbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap informasi dan kebijakan yang dikeluarkan dapat diakses oleh publik.

E-government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-Gov, yang **Pertama**, adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien, walaupun begitu bukan berarti layanan berbasis e-Gov ini mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat, hanya saja “mempermudah” dan “mengembangkan” proses pelayanan dari pelayan kepada yang dilayani (Sosiawan, 2008).

Konsep e-Gov di deskripsikan secara beragam oleh masing – masing individu atau komunitas. Hal tersebut dapat dilihat dari

berbagai definisi di bawah ini mengenai e-Gov di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang sistem pemerintahan mereka.

Menurut Bank dunia (World Bank) mendefenisikan e-Government sebagai berikut :

“Egovernment Mengacu pada penggunaan lembaga pemerintah teknologi informasi yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara , bisnis, dan lain – lain serta pemerintahan.”

Menurut *Janet Caldw*, Direktur dari Institute for Electronic Goverment (IBM Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Harvard University, memberikan sebuah definisi yang menarik yaitu :

“Egovernment adalah kekurangan transformasi mendasar pemerintah dan pemerintahan pada skala yang kita tidak menyaksikan sejak awal era industry”

Pemerintah New Zealand (Andrianto 2007 : 46), melihat e-Gov adalah sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal ini pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualits pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi”.

Lembaga – lembaga pemerintah yang melaksanakan e-Gov adalah lembaga – lembaga yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau kerap diistilahkan dengan ICT (*Information and Communication Technology*), pada tata kelola pemerintahannya.

Teknologi informasi (IT), menurut Martin (1999), tidaklah hanya sebagai teknologi untuk memproses dan menyimpan informasi yang berbasis pada komputer, namun juga menggunakan teknologi komunikasi lainnya dalam rangka menyampaikan informasi atau pesan, dengan demikian, pengelolaan IT adalah pengelolaan penyampaian informasi, baik yang menggunakan komputer maupun alat komunikasi lainnya, seperti electronic mail, voice mail, dan lain – lain. (Priyatno,3:2001).

Konsep pelaksanaan elektronik government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan e-gov disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih

digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-gov harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien, dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan pamong yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk dapat mengakses informasi secara online dibutuhkan infrastruktur jaringan atau media perantara berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel) yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sehingga masing masing bisa saling bertukar data. Atau dalam pengertian yang lebih spesifik Infrastruktur jaringan adalah hubungan dua buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data. Dalam prakteknya, jaringan komputer memungkinkan untuk melakukan berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan bahkan berbagi kekuatan pemrosesan.

Infrastruktur jaringan terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang-punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat.

Keberadaan e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumberdaya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif e-government perlu atau tidak untuk di implementasikan. Sebuah Negara memutuskan untuk mengimplementasikan e- government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi didalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti :

- Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas Negara lainnya.

- Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan
- Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan
- Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya.

2.3.2 Jenis – jenis pelayanan pada E-Government

Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-government. Salah satu cara mengkategorikan jenis – jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :

1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterfapkan dan,
2. Aspek manfaat yaitu hal – hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek diatas, maka jenis – jenis proyek e-government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu Publish, Interact, dan Transact.

A. Publish

Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.

Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasiakan berbagai data informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah computer atau handphone melalui medium internet, dimana alat – alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh aplikasi e-government di dalam kelas ini adalah sebagai berikut :

- Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang – undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga – lembaga legislative (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung)

- Para pengusaha dapat mengetahui syarat – syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang – undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan.
- Rakyat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum situs yang dimiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum)

B. Interact

Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit – unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent as question, news later, mailing list, dan lain sebagainya). Contoh implementasi adalah sebagai berikut :

- Departemen – departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon – calon pegawai negeri baru.
- Rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil – wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu
- Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

C. Transact

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya system keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak – hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindung dengan baik. Contoh aplikasinya adalah berikut :

- Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet.
- Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet.
- Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek – proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet.

Dalam bukunya, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (2006)*, *Indrajit* menjelaskan empat tipe relasi electronic government, yaitu :

I. Government to Citizen (Pemerintah ke masyarakat)

Tipe dari G-to-C merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yang dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portopolio teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal – kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan

pelayanan sehari – hari. Sebagai contoh yaitu kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdak dan antri untuk memperoleh pelayanan.

II. Government to Business (Pemerintah ke Bisnis)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah Negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari – harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entity berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktis bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang

dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industry swasta. Sebagai contoh dari tipe relasi ini adalah para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

III. Government to government (Pemerintah ke Pemerintah)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi Negara – Negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi anatar satu pemerintah ke pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal – hal yang berbau diplomasi semata, namun jauh lebih lagi untuk memperlancar kerja sama antar Negara dan kerja sama antar entity – entity Negara, masyarakat, industry, perusahaan, dan lain- lain sebagainya. Salah satu contoh dari G-to-G ini yaitu hubungan administrasi antara kantor – kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan – kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga Negara asing yang sedang berada di tanah air.

IV. Government to Employees (Pemerintah ke pegawai)

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh dari tipe ini yaitu system pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan dan juga aplikasi dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek financial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun.

Dengan menyadari adanya bermacam – macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh sebuah Negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan Negara itu sendiri.

Secara umum, penentuan kebijakan Pembangunan *Electronic Government* akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai berikut (Indrajit 2006) :

- a) Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan *electronic government* adalah dengan melaksanakan survey system yang ada (infrastruktur komunikasi data, computer, jaringan computer dan system aplikasi) di daerahnya masing – masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil survey tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
- b) Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, restrukturisasi, kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing – masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya.
- c) Pengaruh ketiga datang dari pengalaman – pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan *electronic government* selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah atau Negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan *electronic government*.

2.3.3 Manfaat dalam penerapan Electronic Government

Dalam bukunya, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Indrajit 2006). secara jelas dua Negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu Negara, antara lain :

- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara ;
- Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance ;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari – hari ;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber – sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak – pihak yang berkepentingan ; dan

- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada : serta
- Memberdayakan masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

E-Government secara mudah dapat diartikan sebagai tata cara pemerintahan secara elektronis. Sedangkan dalam arti luas, E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan (www.Deptan.go.id). Electronic Government atau yang biasa dikenal dengan sebutan E-Government sebenarnya memiliki banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun institusi tertentu.

Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, disebutkan bahwa pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

- c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

➤ *Strategi Pengembangan E-Government*

Pencapaian tujuan strategis *E-government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

- a) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

- f) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

➤ *Pengembangan E-Government*

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :

1) Tingkat 1 - **Persiapan** yang meliputi :

- Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
- Penyiapan SDM;
- Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, *Warnet*, *SME-Center*, dll;
- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

2) Tingkat 2 - **Pematangan** yang meliputi :

- Pembuatan situs informasi publik interaktif;
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

3) Tingkat 3 - **Pemantapan** yang meliputi :

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain

4) Tingkat 4 - **Pemanfaatan** yang meliputi :

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
- Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.

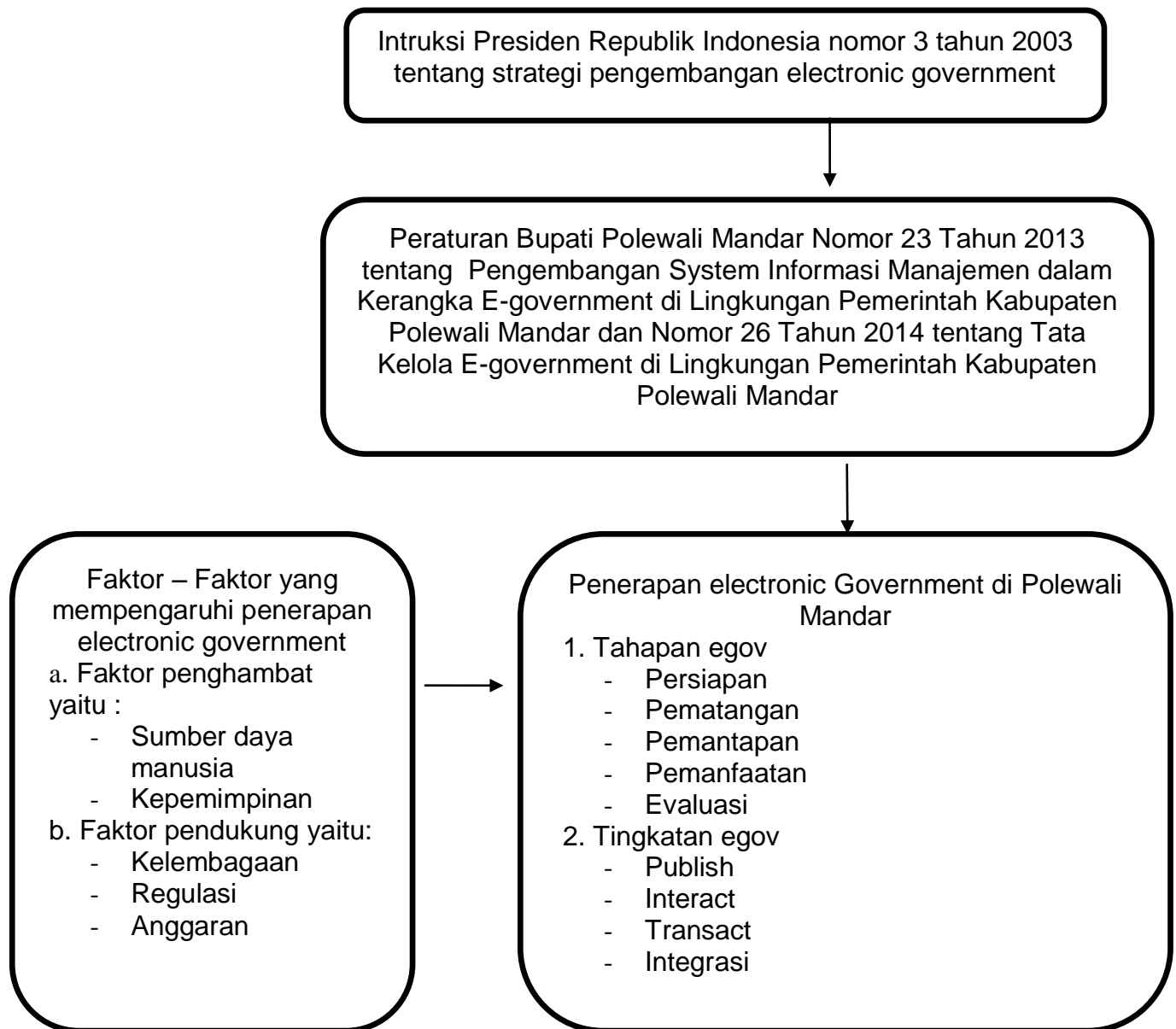
5) Tingkat Evaluasi yaitu tahap dimana kita mengevaluasi bagian – bagian yang telah terlaksana atau belum dilaksanakan, yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program – program berikutnya.

Sedangkan dalam hal tingkatan memang pada dasarnya di kabupaten polewali mandar sudah mencapai tahap informative dalam hal ini publish karena sudah ada Peraturan Bupati yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Dasar pelaksanaan Electronic Government di Polewali Mandar. Sedangkan dalam tahap interaksi baru dua aplikasi yang mendukung yaitu Sistem Payment Online PDAM dan Portal Aduan Pelayanan Publik sms Gateway Pemkab Polman.

Sedangkan pada tahap transaksi belum ada karena masih dalam tahap rencana.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual yang akan mempermudah alur penelitian. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian analisis penerapan kebijakan e-government di kabupaten polewali mandar dapat digambarkan pada konsep sebagai berikut :

Gambar 2.4.1 Bagan Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah polewali mandar Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar dan Kantor Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) yang berada dalam lingkup SKPD Polewali Mandar dengan berdasar pada asumsi bahwa kantor ini merupakan salah satu tempat mengenai bagaimana pelaksanaan E-government sendiri di wilayah Polewali mandar ini dan juga tempat – tempat lain yang berhubungan sehingga sangat memungkinkan semua fenomena yang terjadi di tempat tersebut akan memberikan informasi yang cukup memungkinkan bagi peneliti.

3.2 Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana penerapan Electronic Government di kabupaten polewali mandar. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa pengujian hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, maka objek penelitian ialah peningkatan produksi pertanian. Dalam penelitian ini

penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.

3.3 Sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :

- Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- Interview atau wawancara mendalam yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b) Data Sekunder yaitu data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

Adapun data sekunder diperoleh :

- Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literature atau buku – buku atau data terkait dengan topik

penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

- Dokumentasi yaitu arsip – arsip atau laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Studi Kepustakaan (*library research*)
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel mengenai e-government, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.
- Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan melalui internet
- Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara alat rekaman atau video.

- Penelusuran data online, data yang dikumpulkan seperti studi kepustakaan namun hal yang membedakan hanya media tempat pengambilan data dan informasi dengan memanfaatkan data online melalui internet.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang – orang yang berada dalam lingkup penelitian atau orang yang paham betul atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dari penelitian ini terdiri dari seluruh komponen yang terlibat langsung dalam pelaksanaan e-Government di Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar maupun di Di Kantor Organisasi dan Tata Kelola Polewali Mandar

3.6 Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara kualitatif hal ini didasari dengan perkembangan bahwa penelitian ini dinyatakan akan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

3.7 Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerapan kebijakan *Electronic government* di polewali mandar dimulai dari adanya kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan Electronic Government, sehingga Bupati Polewali Mandar melalui Inpres tersebut mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Kerangka E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Kelola E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Selain itu penerapan kebijakan electronic government di Polewali mandar juga melalui Fase dimana fase tersebut adalah fase perkembangan e-gov dan fase tingkatan e-gov. Dalam Fase Tahapan terbagi atas lima yaitu, tahap persiapan, pematangan, pemantapan, pemanfaatan dan evaluasi.

Sedangkan fase tingkatan terdiri atas publish, interact, transact dan integrasi.

Dalam Fase perkembangan e-gov dapat dikatakan bahwa di Polewali Mandar masih dalam tahap persiapan karena semenjak peraturan bupati keluar instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan electronic government sudah mulai aktif kembali padahal perjuangan yang dilakukan sudah dimulai dari tahun 2001 namun memang pada dasarnya terdapat banyak hambatan. Sedangkan dalam hal tingkatan memang pada dasarnya di kabupaten Polewali Mandar sudah mencapai tahap informative dalam hal ini publish karena sudah ada Inisiasi Pemerintah daerah Yaitu Peraturan Bupati yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Dasar pelaksanaan Electronic Government di Polewali Mandar dan juga dengan adanya inisiasi Dishub kominfo mempercepat pelaksanaan elektronik government di Kabupaten Polewali Mandar melalui pemberdayaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) DAN Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) serta Organisasi Tata Laksana Setda Polewali Mandar mengeluarkan sebuah aplikasi yang berhubungan dengan tata kelola e-government dan itu dimulai sejak tahun 2012, Sedangkan dalam tahap interaksi baru dua aplikasi yang mendukung yaitu

Sistem Payment Online PDAM dan Portal Aduan Pelayanan Publik sms Gateway Pemkab Polman. Sedangkan pada tahap transaksi belum ada karena semuanya masih dalam tahap rencana.

2. faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan electronic government di kabupaten polewali mandar antara lain factor penghambat yang terdiri atas sumber daya manusia dan kepemimpinan sedangkan factor pendukung yaitu kelembagaan, regulasi dan anggaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

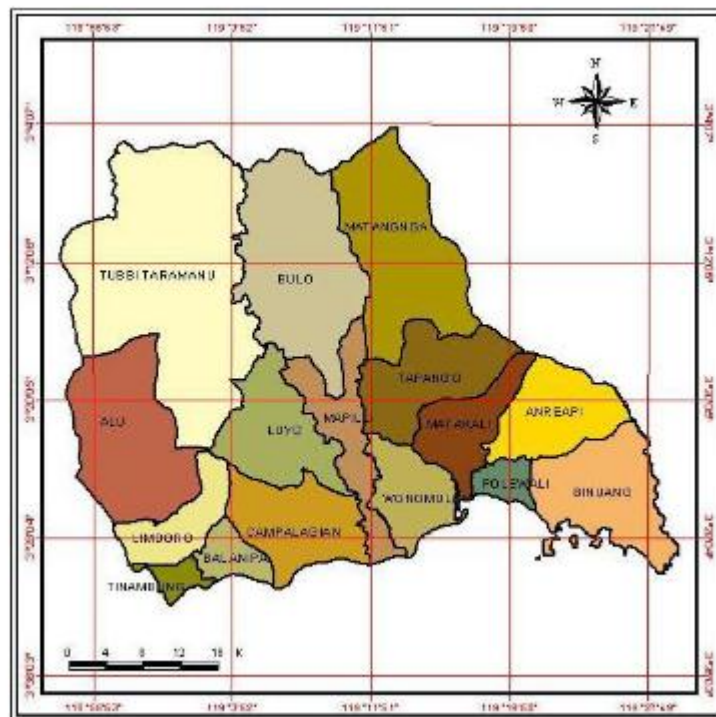
4.1 Profi Daerah Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu diantara 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II, yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 yaitu:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang, dan Swapraja Cenrana (sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;

3. Kabupaten Polewali Mamasa, yang meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam *Onder Afdeling* Polewali dan *Onder Afdeling* Mamasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah provinsi, dua diantara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan kabupaten Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Polewali Mandar

4.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Polewali Mandar yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Barat beribukota di Polewali terletak antara 3o 4' 10" – 3o 32' 00" Lintang Selatan dan 118o 40' 27" - 119o 29' 41" Bujur Timur.

Batas daerah kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km² yang meliputi 16 (lima belas) kecamatan, dimana Kecamatan Tubbi Taramanu dan Kecamatan Bulu merupakan 2 (dua) kecamatan yang terluas dengan luas masing-masing adalah 356,93 km² dan 229,50 km². Luas kedua kecamatan tersebut 29,58 % dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1.06 %. Kabupaten Polewali Mandar sangat kaya dengan sumber daya air sungai, yang terdiri atas sungai besar dan kecil. Tiga sungai besar mengapit wilayah ini yaitu sungai Galang-galang yang menjadi batas dengan kabupaten Pinrang dan sungai Tinambung dengan debit air yang sangat besar, melewati Kecamatan

Tubbi Taramanu, Allu, Limboro, Tinambung dan bermuara di Teluk Mandar. Selain itu, terdapat sungai Mapilli yang merupakan sungai terbesar dengan lebar muara kurang lebih 500 meter berasal dari aliran sungai Matangnga, dan Masunni melewati Mapilli dan Kecamatan Campalagian dan juga bermuara di Teluk Mandar.

Tabel 4.1.1

Luas Daerah, Presentase Luas Terhadap Luas Kabupaten, dan Jumlah Kelurahan/Desa Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014

Kecamatan		Luas wilayah		Jumlah kelurahan / Desa
		Luas (km)	Persentase (%)	
1.	Tinambung	21,34	1,06	8
2.	Balanipa	37,42	1,85	11
3	Limboro	47,55	2,35	11
4	Tubbi Taramanu	356,95	17,65	13
5	Allu	228,30	11,29	13
6	Campalagian	87,84	4,34	18
7	Luyo	156,60	7,34	11
8	Wonomulyo	72,82	3,60	14
9	Mapilli	91,75	4,53	12
10	Tapango	125,81	6,22	14
11	Matakali	57,62	2,85	7
12	Polewali	26,27	1,30	9
13	Binuang	123,34	6,10	10
14	Anreapi	124,62	6,16	5
15	Matangnga	234,92	11,62	7
16	Bulo	229,50	11,35	9
Jumlah		2.022,30	100,00	167

(Sumber Data : Badan Pusat Statistik Polewali Mandar)

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2014 jumlah penduduk Polewali Mandar mencapai 412.122 jiwa terdiri dari 201.112 jiwa laki-laki dan 211.010 jiwa perempuan dengan 92.895 rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4.4 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar menurut umur sebagai berikut 34,12% penduduk usia muda (0-14), 5.25% penduduk usia tua (65 tahun keatas), 60.6% penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Nilai sex ratio Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,3 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. Jika dilihat persebaran penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 57.095 jiwa. Kecamatan Polewali sekaligus merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km².

Tabel 4.1.2

**Jumlah Rumah tangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per
Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014**

	Kecamatan	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk	Rumah tangga
1.	Tinambung	23.314	1.093	4.931
2.	Balanipa	24.654	659	5.287
3	Limboro	17.341	365	4.180
4	Tubbi Taramanu	19.231	54	4.326
5	Allu	12.388	54	2.822
6	Campalagian	54.125	616	11.963
7	Luyo	28.139	180	6.137
8	Wonomulyo	46.976	645	11.379
9	Mapilli	27.830	303	6.284
10	Tapango	22.586	180	5.427
11	Matakali	22.247	386	5.002
12	Polewali	57.569	2.91	12.657
13	Binuang	31.500	255	7.054
14	Anreapi	97.68	78	2.129
15	Matangnga	53.03	23	1.242
16	Bulo	91.51	23	2.075
	JUMLAH	412.122	204	92.895

Sumber data (Polewali Mandar dalam angka 2014)

4.1.3. Keadaan Sosial Budaya

1. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah realisasi program wajib belajar 12 tahun. Melalui program ini diharapkan tercipta sumber daya manusia yang siap mengembangkan diri untuk bersaing di era globalisasi. Polewali Mandar senantiasa berupaya menciptakan masyarakat terdidik. Hal ini dapat diamati, antara lain melalui peningkatan jumlah sarana di sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Setiap tahun, jumlah murid/siswa dari TK hingga tingkat perguruan tinggi mengalami peningkatan.

Pada tingkat Sekolah Dasar terdapat 326 sekolah dengan 3.552 guru yang mengajar 51.286 murid. Sementara pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdapat 78 sekolah dengan 1.198 guru yang mengajar 16.848 murid sedangkan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdapat 12 sekolah dengan 443 guru yang mengajar 6.095 murid. Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar berturut-turut dari taman kanak-kanak sampai

sekolah lanjutan tingkat atas masing-masing terdapat sebanyak 109 unit sekolah taman kanak-kanak, 326 unit sekolah dasar, 78 unit sekolah lanjutan tingkat pertama, 35 unit sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat.

Tabel 4.1.1.1
Jumlah Sekolah/Perguruan Tinggi, Jumlah Murid/Mahasiswa,
dan Jumlah Guru/Dosen per Jenjang Pendidikan Tahun 2014

NO	Jenjang pendidikan	Sekolah/ Perguruan Tinggi	Guru/Dosen	Murid/ Mahasiswa
1	TK	109	516	4.527
2	SD	323	3.542	51.268
3	SMP	78	1.198	16.848
4	SLTA	35	1.021	14.832
5	Perguruan Tinggi	4	194	2.609

sumber data (Polewali Mandar dalam angka 2014)

2. Kesehatan

Upaya Pemerintah Polewali Mandar dalam hal Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka terjadi peningkatan kesejahteraan. Ketersediaan sarana kesehatan akan sangat menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 terdapat 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 20

puskesmas, 56 pustu, 97 poskesdes, dan 514 posyandu di Kabupaten Polewali Mandar.

Disamping sarana kesehatan, sumber daya manusia dibidang kesehatan juga menentukan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2012 mencapai 558 orang yang terdiri dari dokter umum 35 orang , dokter gigi 12 orang, perawat 209 orang, bidan 211 orang, farmasi 17 orang dan 74 tenaga non medis.

3. Agama

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Walaupun sebagian besar penduduk Polewali Mandar beragama Islam namun sarana peribadatan agama lain tetap ada. Dalam tahun 2014 jumlah sarana peribadatan yang ada sebagai berikut : tempat peribadatan agama Islam terdiri dari 763 mesjid dan 39 mushola, tempat peribadatan agama Kristen yang terdiri dari Kristen Prostestan dan Katolik masing-masing berjumlah 45 gereja dan 9 gereja. Secara garis besar, pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar menurut agama yang dianutnya adalah 379.847 umat Islam, 10.682 umat Kristen Protestan, 4.217 umat Katolik, dan 4 umat Hindu.

4.1.4. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

➤ **Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.**

Sebagaimana tertera dalam Pola Dasar Pembangunan (Poldas)

Visi Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Polewali Mandar Bernafaskan Ajaran Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Sipamandar”

Visi ini mengandung pengertian yang luas, dan merupakan gambaran aspirasi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Bermakna pengelolaan terhadap komponen yang dapat membawa institusi pemerintahan dalam hal ini Kabupaten Polewali Mandar untuk lebih maju. Unsur-Unsur tersebut adalah *Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta)*. Ketiga unsur inilah yang dapat membangun Kabupaten Polewali Mandar. Apabila ada unsur yang terlalu dominan dan yang lain didominasi maka akan terjadi disharmonisasi atau fungsi pemerintahan tidak berjalan, termasuk menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Itulah yang terlihat selama ini sebagai kenyataan. Pemerintah terlalu dominan sehingga unsur yang lain menjadi terpenggirkan. Sebutlah masyarakat dan dunia usaha yang menjadi penonton dan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Olehnya

fungsi fasilitator pemerintah diharapkan mampu menata daerah dalam membangun daerah.

2. Bermakna bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan adalah bagaimana membangun kepercayaan publik (masyarakat). Membangun kepercayaan pemerintah di mata masyarakatnya kami anggap sangat penting oleh karena pemerintah adalah komponen utama dalam menata kehidupan masyarakat. Pengalaman selama ini masyarakat masih ditempatkan komponen terpisah dari pemerintahan, sehingga interaksi tidak tergabung dengan baik. Pemerintahan yang baik dan terpercaya pada prinsipnya dapat dibangun dari adanya proses pelibatan yang sangat tinggi antara semua institusi yang ada. Kepercayaan bagi suatu pemerintahan adalah merupakan aset yang tidak terlihat tetapi sangat bernilai. Pemerintahan yang tidak akseptabel akan membawa berbagai akibat termasuk didalamnya adalah pengembangan atau penolakan Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, sebab pemerintahan yang tidak terpecaya akan tidak efektif dalam membuat keputusan. Pemerintahan yang tidak dipercaya juga akan berakibat pada rendahnya daya saing daerah, lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah, dan yang paling fundamental adalah hilangnya

keteraturan dan kepercayaan publik yang seharusnya tercipta di setiap daerah.

Dengan demikian Pemerintahan yang baik dan terpercaya pada prinsipnya adalah kunci dari semua yang seharusnya diciptakan oleh pemerintah dan akan menjadi penentu utama dalam menjalankan program-program pembangunan lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintah dimasa mendatang tidak hanya milik penyelenggara pemerintahan saja, tetapi menjadi milik dari tiga unsur utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiganya mempunyai kedudukan yang sejajar.

3. Indikator Pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam Visi ini adalah kemampuan pemerintah Polewali Mandar untuk menciptakan suatu nilai berupa nilai *Keterbukaan* mulai dari penataan agenda kebijakan sampai pada implementasi kebijakan, nilai *kebutuhan dan manfaat* terutama bagi masyarakat, *akuntabel*, mampu mengembangkan nilai demokratisasi, dapat menciptakan nilai *pemberdayaan masyarakat*, serta kemampuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap individu dan organisasi untuk mengakses berbagai peluang untuk pembangunan di daerah.

4. Bernafaskan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sipamandar dimaksudkan bahwa program

pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh komponen pemerintah, swasta pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat dilaksanakan dengan bertumpu pada nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dan mampu sinergis dengan nilai dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah. Proses revitalisasi budaya hendaknya menjadi semangat dan warna dalam pembangunan daerah. Nilai budaya dalam otonomi daerah menjadi hal yang utama sebab pembangunan hendaknya sesuai dengan semangat dan kebutuhan tiap daerah.

Berdasarkan nilai agama dimaksudkan bahwa pembangunan yang diarahkan pada penciptaan pemerintahan baik dan terpercaya dilaksanakan dengan melihat kesesuaian pada nilai dan semangat keagamaan. Nilai dan semangat tersebut tidak terlepas dari makna makro akan keridhoan dan kesyukuran masyarakat Polewali Mandar akan karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap Sumber Daya yang ada dan yang diberikan.

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya Visi kabupaten Polewali Mandar yaitu berusaha membangun suatu pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya sebagai sebuah persyaratan terselenggaranya suatu fungsi pemerintahan yang akan menyelenggarakan suatu siklus kegiatan

pembangunan yang akhirnya dapat membangun masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera, maju dan mandiri dengan di dasari oleh nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Polewali Mandar.

➤ **Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Polewali Mandar menuju kondisi yang diharapkan maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam berintegrasi dengan tatanan kehidupan global.
2. Melaksanakan agenda “Reformasi” berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang bebas dari praktek: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Penegakan supremasi hukum dan HAM untuk tumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana serta memaksimalkan sektor-sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

6. Meningkatkan SDM dan pemberdayaan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada kemandirian lokal.
7. Mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap bentuk kemitraan pembangunan serta menciptakan iklim yang kondusif untuk memacu kehidupan perekonomian daerah.
8. Mengembangkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah agropolitan dalam mengantisipasi pasar global.

➤ **Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar**

Untuk sukses dalam menjalankan kebijakan di atas akan sangat ditentukan pada strategi pendekatan yang digunakan dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk itu, kami dalam lima tahun kedepan akan menjalankan strategi yaitu :

1. Strategi Perubahan Manajemen (Change Management) Pemerintahan

Yaitu suatu pendekatan yang menekankan pentingnya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan di Daerah dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat ketimbang mengerjakan sendiri urusan daerah;

2. Strategi Pertumbuhan dan Pengembangan

Yaitu strategi mengembangkan daerah dengan melihat potensi-potensi pertumbuhan dan dapat dikembangkan sebagai potensi dan aset daerah;

3. Strategi Partisipatif

Dilaksanakan dengan pelibatan secara aktif sebanyak-banyaknya komponen masyarakat dalam proses pembangunan;

4. Strategis Kemitraan dan Networking

Yaitu strategi pembangunan daerah yang berbasis kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai komponen, serta pengembangan jaringan yang berdampak positif untuk pembangunan daerah;

5. Koordinasi Fungsional

Yaitu strategi pembangunan daerah yang terkoordinasi dengan baik sesuai posisi dan kewenangan masing-masing dan didukung oleh operasional manajemen pemerintahan yang terkoordinasi dan berjalan fungsional sesuai tugas yang telah ditetapkan.

6. Ketaatan Hukum dan Undang-Undang

Yaitu Strategi pembangunan daerah yang senantiasa berpedoman pada segala aturan yang ada dan telah ditetapkan, hal ini dibutuhkan dalam rangka membangun ketaatan pada hukum oleh

semua komponen pembangunan dan diharapkan akan mampu menciptakan suatu sistem keteraturan.

Sesuai dengan strategi diatas dan dengan tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun kedepan, khususnya dalam menciptakan pemerintahan baik dan terpercaya diarahkan pada :

- Implementasi Kebijakan dan Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 pasal 11 dan dengan pemantapan pengembangan dan pembangunan daerah pada 11 kewenangan. Pemantapan kerangka berupa penguatan dan peningkatan bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terpercaya meliputi sebelas bidang pemerintahan yaitu meliputi pekerjaan *Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja* dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga pemerintahan, politik dan kemasyarakatan yang ada, khususnya

DPRD sebagai lembaga strategis dalam merumuskan kebijakan tersebut.

- Mendorong dengan jalan mendukung operasionalisasi kebijakan pusat berupa penyelenggaraan kewenangan sesuai pasal 29 No 22 tahun 1999 bidang politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama. ini dimaksudkan agar daerah secara langsung harus terlibat mendukung proses kebijakan pembangunan nasional, dalam rangka stabilitas yang berjangka panjang dalam pembangunan.

4.2 Penerapan Electronic Government di Kabupaten Polewali Mandar

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu daerah, dalam hal ini yang sangat vital adalah aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat penting. Terlebih lagi semenjak internet hadir dalam hidup kita, tidak hanya itu baik itu handphone maupun alat komunikasi lainnya. Jika ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik maka suatu tata pemerintahan harus dapat segera menyesuaikan, mengadaptasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi di masa kini. Tidak hanya itu melalui penataan informasi yang dikelola secara akurat dan efektif masyarakat akan lebih mudah memahami bahkan akan lebih mudah memberikan

sebuah dukungan dikala suatu kebijakan tidak disetujui. Tapi jika suatu informasi tidak disampaikan secara baik maupun transparan maka akan timbul suatu masalah.

Sejak dikeluarkannya intruksi presiden Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* telah memacu Kabupaten Polewali Mandar untuk ikut serta dalam merealisasikan rencana pemerintah tersebut, apalagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka Electronic Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*. Dan bukan hanya itu Bupati Polewali Mandar juga mengeluarkan sebuah kebijakan baru melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Tata Kelola Electronic Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa semenjak dikeluarkannya peraturan bupati tersebut Bupati Polewali Mandar sudah merealisasikan rencana pemerintah tersebut melalui kebijakan tadi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaannya pasti akan ada masalah. Oleh karenanya melalui kebijakan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memanfaatkan

potensi sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sampai sejauh mana perkembangan penerapan kebijakan *Electronic Government* di Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan penelitian di Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar dimana dinas ini yang mengelola bagian aplikasi electronic government serta SKPD yang terkait dalam hal ini yaitu Kantor Organisasi dan Tata Kelola yang pastinya berhubungan dengan tata kelola electronic government itu sendiri. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan *electronic government* di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar, yang didalamnya terdapat Bidang Komunikasi dan Informatika yang menangani penerapan *electronic government* melalui Teknis Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen di Polewali Mandar. Dinas ini pada awalnya merupakan salah bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Polewali Mandar dan setiap tahunnya mengalami pergantian nama dan itu berubah sesuai rezim pemerintahan seperti dari Penerangan menjadi PDIK dan dari PDIK menjadi Infokom selanjutnya yang terakhir dari

Infokom Ke Dishub Kominfo. Perubahan yang terakhir ini mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggabungkan Bidang Komunikasi dan Informatika kedalam Dinas Perhubungan menjadi Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Electronic Government yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi baik itu internet dan sebagainya sebagai alat bantu masyarakat maupun pemerintah yang berbasis teknologi internet guna memberikan informasi secara efektif dan cepat.

Pada dasarnya proses dari pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa informan. Wawancara kepada informan merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti agar peneliti mendapatkan informasi yang valid mengenai apa yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam penerapan *electronic government* di Polewali Mandar.

Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar, **H.M. Yusuf. D. Madjid, SH,MM** dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo, **H. Sahabuddin**, Kepala Bagian

Organisasi dan Tata Laksana Sekda Polewali Mandar **Nengah T. Sumadana** serta staff dan beberapa masyarakat. Namun, sejalan dengan penelitian ini kebutuhan akan informasi membutuhkan beberapan informan lagi sehingga informan dalam penelitian ini bertambah dari sebelumnya. Dan informan tersebut terkait dalam pengembangan *electronic government*.

Selama masa penelitian peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan mengacu pada definisi operasional yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pedoman wawancara yang dibuat peneliti terbuat dari pertanyaan – pertanyaan yang bersifat umum dan mendetail, sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang lengkap.

Dalam tahap penerapan *electronic government* di kabupaten polewali mandar ini, ada beberapa dinas yang ikut andil dalam pelaksanaannya seperti Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang bertugas dalam kebijakan Tata Kelola *Electronic Government* pelaksanaan *electronic government* itu sendiri dan Hubungan masyarakat yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan public atau website pemerintah daerah. Dishub Kominfo sendiri bertugas memberikan fasilitasi atau teknis melalui fungsi teknologi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses

menurut hasil wawancara 14 Januari 2015 yaitu Bapak Nengah selaku Kepala Bagian di Ortala mengatakan :

“Kalau kebijakan ortala hanya sebagai pelaksanaannya dari aplikasi yang dibuat sedangkan kominfo sebagai fasilitasi atau teknis atau pemerintah dalam hal ini fungsi teknologi dan masyarakat dalam hal ini penikmat.”

Dan juga dalam wawancara Bapak Mustari yang merupakan mantan kepala bidang Infokom mengatakan bahwa :

“kalau mau teliti tentang tata kelola electronic government bisa kebagian organisasi tata laksana setda polman, kalau tentang aplikasi electronic government ke bidang kominfo. Tapi saya sarankan lebih baik tata kelolanya dulu karena aplikasinya belum berjalan efektif”

Dalam hal tersebut Dishub kominfo melakukan pengembangan e-government terhadap pembinaan teknis dan integrasi sim dalam hal ini dishub kominfo yang lebih tahu mengenai aplikasi e-gov. Sedangkan kebijakan tata kelola electronic government berada pada Organisasi tata laksana setda polewali mandar.

4.2.1. Implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dalam Lingkup pemerintah polewali mandar

❖ Kondisi existing infrastruktur TIK di Polewali Mandar

Pembangunan infrastruktur jaringan bukanlah hal yang mudah. Disamping teknologi canggih dan tergolong rumit yang digunakan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam penyediaannya.

Ditambah lagi aparaturnya yang sebagian besar masih awam mengenai teknologi informatika menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Secara singkat dapat diuraikan bahwa ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) khususnya jaringan internet di kabupaten Polewali Mandar mulai dibangun sejak tahun 2001 yaitu dibangunnya jaringan Local Area Network (LAN) oleh Kantor Pengolahan Data Informasi dan Kearsipan (PDIK) di lingkungan Sekretariat Daerah yang menghubungkan antara bagian yang ada di Sekretariat Daerah serta beberapa unit kerja yang ada dalam lingkungan Kantor Bupati Polewali Mandar ketika itu. Pusat pengendalian jaringan(server) ditempatkan di kantor PDIK pada saat itu. Namun jaringan LAN ini tidak berfungsi optimal akibat terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan.

Pada tahun 2003 Kantor Pengolahan Data, Informasi dan Kearsipan (PDIK) membangun kembali instalasi jaringan Metropolitan Area Network (MAN) dengan menggunakan teknologi Wireless yang menghubungkan delapan titik SKPD (satuan kerja pemerintahan daerah) yaitu Kantor PDIK sebagai pusat server, Sekretariat Daerah, Bappeda(badan perencanaan pembangunan daerah), Dipenda(dinas pendapatan daerah) (sekarang DPP), Dinas PU(pekerjaan umum), Dinas Pertanian, BKDD(badan kepelatihan diklat daerah), DPRD, BPD(badan pertimbangan desa). Namun jaringan tersebut tidak

mampu berfungsi optimal akibat rendahnya kemampuan SDM di masing masing SKPD untuk mengelola dan memanfaatkan jaringan ini. Ditambah lagi kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan serta banyaknya instalasi jaringan yang rusak akibat adanya rehabilitasi dan perpindahan kantor. Celakanya, pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan jaringan Metropolitan Area Network (MAN) hanya bertanggungjawab terhadap kerusakan jaringan hanya pada masa pemeliharaan proyek. Setelah pekerjaan tersebut diserahkan maka lepaslah tanggung jawab sang pelaksana proyek. Untuk menghubungi apabila ada kerusakan, harus mengeluarkan biaya lagi karena pelaksana proyek tidak bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar ”

Jaringan internet mulai terkoneksi di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2002 yaitu saat Menteri Dalam Negeri meluncurkan program Sistem Informasi Komunikasi Manajemen Pemerintah Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) berdasarkan Kepmendagri Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sistem ini memanfaatkan satelit sebagai media jaringan komunikasi yang menghubungkan antara Sistem Informasi

Komunikasi Manajemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMPEDA). Meski program ini telah dipersiapkan secara matang dengan anggaran yang tidak sedikit serta dilengkapi infrastruktur jaringan internet yang sangat mutakhir ketika itu, namun program ini tidak berjalan efektif. Alasannya cukup klise, yaitu ketidaksiapan SDM Aparat pengelola jaringan

Selanjutnya dipertengahan tahun 2004, PT Telkom meluncurkan paket internet Telkomnet Instant.

Beberapa instansi memanfaatkan fasilitas jaringan ini untuk koneksi internet, tapi sayang kecepatan koneksi (connection speed) saat itu masih sangat lambat, sehingga jaringan ini tidak bertahan lama digunakan. Lalu pada tahun 2005 Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) dengan menggunakan jaringan internet sebagai media pembelajaran. Program tersebut dinamai Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional).

Program jardiknas ini cukup membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi di Kabupaten Polewali Mandar. Alokasi bandwidth (ukuran kecepatan pengiriman data) yang cukup besar, membuat jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pelayanan publik oleh beberapa SKPD. Namun dalam perjalanannya, penggunaan jaringan

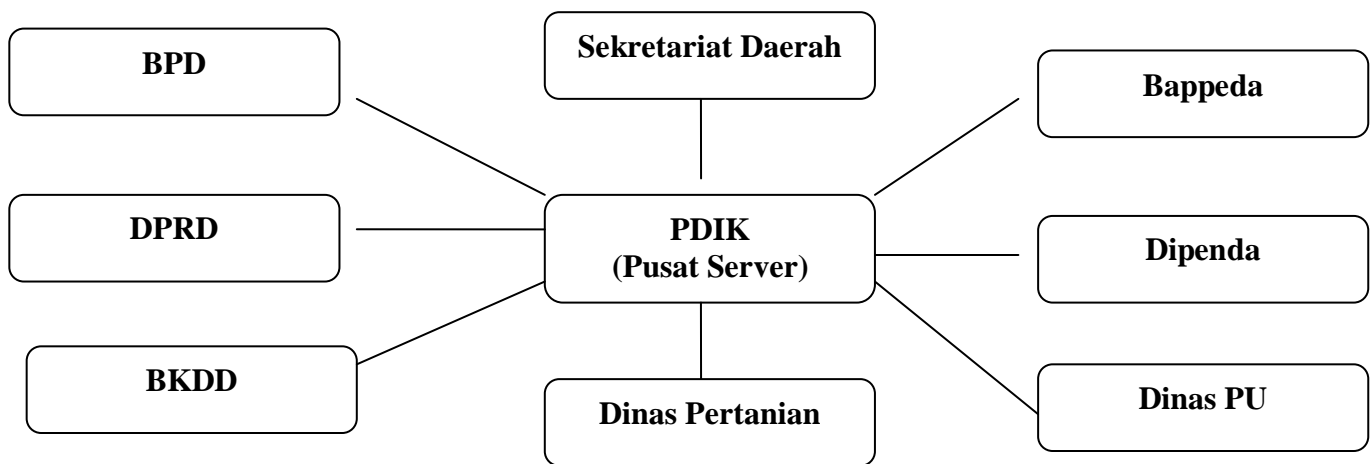
ini dikelola dengan baik. Banyak pihak yang menggunakan jaringan ini untuk kepentingan pribadi sehingga arus lalu lintas jaringan menjadi lambat.

Menyikapi fenomena tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah melalui Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengadakan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga penyedia jasa layanan internet (provider) untuk pengadaan koneksi internet via satelit. Fasilitas VSAT (Very Small Aperture Terminal) milik eks SISKOMDAGRI terbengkal di optimalkan kembali. Hasilnya dapat dinikmati dengan terkoneksi internet dilingkungan Sekretariat Daerah, dan terkoneksi ke Dinas Pendapatan dan Perizinan dan Dishubkominfo. Tapi lagi lagi jaringan ini tidak berfungsi optimal akibat adanya kelalaian pihak penyedia jasa layanan yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada bulan Juni 2009, PT. Telkom kembali meluncurkan program Telkomnet Speedy. Program ini, memberi warna baru dalam pengembangan teknologi Komunikasi Informasi di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan internet. Sejak Telkom Net Speedy mulai beroperasi di kabupaten Polewali Mandar, akses jaringan internet disetiap SKPD sudah terkoneksi, bahkan beberapa SKPD memasang jaringan Wifi Hotspot (koneksi

internet tanpa kabel) seperti di Kantor Bappeda, Kantor BKDD dan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan dan Perizinan.

Gambar 4.2.1 Jaringan Internet pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar diawal pengembangannya pada tahun 2003



Untuk membangun jaringan computer (LAN) dalam satu lokasi (gedung, kantor, perusahaan, sekolah, dsb) tidaklah serumit dengan membangun jaringan yang lebih luas (WAN), dalam hal ini jaringan yang terpisahkan oleh jarak yang cukup luas dan jauh. Sebab, selain perangkat yang digunakan lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan LAN, kesesuaian antar masing – msing jaringan juga diperlukan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mustari, yang merupakan mantan kepala bagian Kominfo, Dishub dan Kominfo wawancara 23 Januari 2015 bahwa :

“Sulitnya membangun jaringan antar SKPD disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai dan banyaknya instalasi jaringan yang rusak akibat adanya rehabilitasi dan perpindahan kantor.”

Masih banyaknya hambatan dalam pembangunan infrastruktur jaringan ini tentunya mempengaruhi langkah pemerintah kota dalam menerapkan electronic government. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah serta rendahnya SDM di masing – masing SKPD untuk mengelola jaringan, ditambah lagi kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan. Ini tidak hanya terjadi di Polewali Mandar semata, Depkominfo juga menyatakan bahwa hal ini merupakan kecenderungan yang terjadi di setiap daerah.

Keinginan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan penerapan elektronik goverment dalam pelayanan publik telah menjadi dambaan semua masyarakat. Namun harapan tersebut masih sebatas impian. Karena Menurut Nugroho (2007:3) mengimplementasikan e-gov sesungguhnya bukan pekerjaan mudah. Kesulitannya tidak terletak pada aspek-aspek teknis yang terkait

dengan pembangunan sarana, fasilitas, dan sistem-sistem berbasis TI, tetapi justru lebih pada bagaimana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diselaraskan (aligned) dengan proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Dari pengamatan sementara dapat dikemukakan bahwa inisiatif Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengimplementasikan elektronik government dimulai sejak tahun 2002 yakni dibangunnya jaringan Local Area Network (LAN) di Sekretariat Daerah yang menghubungkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada dalam kompleks Bupati Polewali Mandar dan disekitarnya. Sayangnya pembangunan infrastruktur jaringan LAN tersebut tidak berfungsi maksimal karena jaringan instalasi kabel banyak yang rusak akibat terjadinya rehabilitasi pembangunan Kantor Bupati Polewali Mandar. Lalu pada tahun 2003 dibangun jaringan WAN (Wireless Area Network) yang menghubungkan delapan titik SKPD. Pembangunan jaringan ini pun tidak berfungsi maksimal akibat terbatasnya SDM aparatur yang mampu mengoperasikan jaringan WAN di setiap SKPD saat itu.

Selanjutnya Tahun 2005 Pemerintah Daerah melakukan launching portal resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar <http://www.polewalimandarkab.go.id>. Pada tahun 2005, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menerapkan aplikasi sistem informasi dalam mengelola proses

administrasi dan manajemen pemerintahan dilingkup unit kerja bersangkutan diantaranya Sistim Informasi Akutansi Keuangan Daerah (SIAKDA) yang diterapkan oleh *Dinas Pendapatan dan Perijinan*, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kepegawaian (SIMPEG) yang diterapkan oleh *Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah*. Lalu pada tahun 2007 *BAPPEDA* membuat Sistem Informasi Jalan Jembatan (SIJANTAN) serta Sistem Informasi Lahan (SIL) dan Geografi Information Sistim (GIS).

Pada tahun yang sama Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mulai membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) beserta infrastruktur jaringan on-line. Namun sistem ini tidak serta merta dapat diaplikasikan mengingat keterbatasan SDM aparat yang mampu mengoperasikan sistem tersebut saat itu. Setelah dua tahun mengalami proses uji coba dan pengenalan sistem maka pada tahun 2009 sistem ini mulai diaplikasikan seiring dengan berubahnya status kelembagaan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menjadi *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*.

Selain untuk kepentingan pelayanan publik, telah dibuat pula program aplikasi yang dibuat khusus untuk kepentingan pengelolaan data misalnya Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang dikelola oleh *Dinas pendidikan pemuda dan Olah Raga*. Demikian pula halnya dengan Sistim Informasi Pengelolaan

Barang Daerah (SIMBADA) yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan Barang dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Kondisi riil di lapangan pada umumnya menunjukkan bahwa sistem informasi yang telah dibuat di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dibangun di atas komponen-komponen yang berbeda. Heterogenitas tidak hanya terjadi pada perangkat keras (hardware), sistem operasi, program aplikasi tetapi juga terjadi pada sistem basis data yang digunakan. Dalam kondisi ini muncullah isu interoperabilitas: bagaimana sistem-sistem yang berbeda tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Bagaimana sistem informasi yang dibangun bisa saling terintegrasi dalam satu format data base.

Disamping hal tersebut di atas, hal yang sangat berpengaruh dalam keterlamabatan penerapan e-gov di Kabupaten Polewali Mandar adalah terbatasnya sarana akses internet khususnya di wilayah kecamatan. Saat ini hanya ada dua kecamatan yang terjangkau akses internet dengan menggunakan jaringan speedy dari PT Telkom. Beberapa kecamatan dapat mengakses internet melalui fasilitas modem GSM tetapi aksesnya sangat lambat. Meskipun saat ini telah tersedia jaringan internet melauli program PLIK yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika namum hal tesebut belum berjalan efektif.

Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov di Kabupaten Polewali Mandar saat ini pada dasarnya hampir senasib dengan Daerah Kabupaten lainnya. Oleh karena itu untuk mempercepat penerapan e-gov maka langkah mendasar yang segera dilakukan adalah merevitalisasi program e-gov yang telah berjalan. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas.

Revitalisasi yang dimaksudkan adalah serangkaian tindakan perencanaan dan penataan ulang program e-gov yang disesuaikan kembali dengan target pembangunan nasional dan sektor telematika dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar serta proses pentahapan e-gov tanpa menyia-nyiakan kondisi eksisting yang sudah dicapai.

Beberapa langkah yang bisa diambil dalam waktu dekat adalah sebagai berikut

- a) Mensikronkan target-target pembangunan nasional dalam sektor telematika dengan beberapa program e-gov yang akan dilaksanakan di seluruh lembaga dan departemen. Langkah ini sekaligus sebagai proses evaluasi program e-gov yang pernah dijalankan di semua tingkatan.
- b) Meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku ekonomi swasta, termasuk pejabat pemerintahan atas potensi yang dapat

disumbangkan program e-gov dalam mencapai target pembangunan nasional dan sektor telematika.

- c) Menyelesaikan berbagai program utama e-gov yang belum berhasil dilaksanakan, dan menyusun prioritas program e-gov yang dapat menciptakan lapangan kerja serta membantu penegakan praktek good governance dalam berbagai pelayanan publik.
- d) Menambah akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan untuk mengutamakan pemanfaatan e-gov dalam segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan struktur tarif yang transparan dan terjangkau buat semua kalangan. Jika perlu dapat saja diberlakukan diferensiasi tarif untuk semua aplikasi e-gov.
- e) Alokasi dana e-gov perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengan tahapan yang telah dicapai. Dana bisa berasal dari, RAPBN, kerjasama internasional atau juga dari swasta nasional.
- f) Menetapkan hanya beberapa aplikasi e-gov pilihan –sebagai contoh sukses- yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sehingga terjadi efisiensi dalam pemberian pelayanan publik.

Evaluasi dan revitalisasi e-gov juga sangat diperlukan seperti diingatkan Kabani (Bagus et.al ; 2008,5) bahwa adalah

suatu keharusan untuk melakukan proses perencanaan secara hati-hati dan untuk melakukan streamlining berbagai proses off-line sebelum melanjutkannya menjadi proses on-line. Sebagai tambahan, juga sangat penting diperhatikan agar instansi pemerintah untuk tidak melakukan proses otomatisasi berbagai inefisiensi. Revitalisasi e-gov ini semakin dirasakan perlu ketika kita harus juga mempersiapkan diri menyambut berbagai perkembangan baru dalam globalisasi industri dan perdagangan dunia. Berbagai perkembangan teknologi telematika yang semakin konvergen juga membuat pemerintah harus terus menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan antisipatif dalam penyelenggaraan e-gov di berbagai sektor

Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, pencapaian tujuan strategis e-gov perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu :

- Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic.
- Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

- Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- Mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
- Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-gov pada setiap lembaga pemerintahan dibangun dalam sebuah kerangka arsitektur untuk menjadi pedoman penertapan e-gov. instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini. Kerangka arsitektur e-gov terdiri dari empat lapis struktur, yakni :

1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses

pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antarback office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Upaya pemerintah dalam Pemberdayaan PLIK dalam mendukung percepatan penerapan electronic government merupakan Konsep pelaksanaan elektronik government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan e-gov disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-gov harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien, dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan pamong yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk dapat mengakses informasi secara online dibutuhkan infrastruktur jaringan atau media perantara berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel) yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sehingga masing masing bisa saling bertukar data. Atau dalam pengertian yang lebih spesifik Infrastruktur jaringan adalah hubungan dua buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya adalah untuk

melakukan pertukaran data. Dalam prakteknya, jaringan komputer memungkinkan untuk melakukan berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan bahkan berbagi kekuatan pemrosesan. Infrastruktur jaringan terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang-punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat.

Salah satu penyebab sulitnya menerapkan elektronik goverment pada level intraksi maupun level transaksi atau level integrasi adalah terbatasnya sarana akses internet di Polewali Mandar. Akses internet yang digunakan selama ini adalah program layanan speedy yang disiapkan oleh PT.Telkom. Program layanan internet dari speedy ini hanya mampu menjangkau dua kecamatan yaitu Kecamatan Polewali dan Kecamatan Wonomulyo. Sementara dikecamatan lainnya koneksi internet hanya dapat diakses dengan menggunakan fasilitas modem melalui telepon seluler. Bahkan ada tiga kecamatan yang belum tersentuh sama sekali jaringan internet karena diwilayah tersebut belum ada jaringan telepon seluler.

Kehadiran program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) merupakan salah satu upaya pemerintah polewali mandar dalam menerapkan e-gov ini yang diprogramkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan solusi jitu dalam mengatasi keterbatasan akses internet di kecamatan. Hal ini tentu membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, khususnya masalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur jaringan internet akan teratasi melalui program PLIK dan M-PLIK tersebut.

Dapat digambarkan bahwa inisiasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam mengimplementasikan electronic government, tingkat capainya baru berada pada level dasar fungsi e-gov, yakni berfungsi sebagai media informasi satu arah saja (one way communication). Masih membutuhkan suatu kerja keras yang terencana dan terukur bila ingin menerapkan fungsi e-gov pada level interaksi atau meningkat pada level transaksi terlebih lagi bila ingin menerapkan e-gov pada level integrasi. Fakta inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan e-gov di Kabupaten Polewali Mandar.

Seperti yang dikatakan bapak Mustari yang dulu merupakan Kepala Bagian Infokom beliau mengatakan :

“Aplikasi electronic government di polewali mandar ini sebagian besar masih dalam tahap informative, kalau tahap interaksi baru dua aplikasi yang mendukung yaitu Sistem Payment Online PDAM dan Portal aduan pelayanan public sms gateway pemerintah kabupate Polewali Mandar. Untuk aplikasi e-gov yang mendukung tranksaksi belum ada kita masih menunggu aplikasinya yaitu system pelayanan satu pintu pemerintah kabupaten dan pelayanan online PDAM.”

Pada tanggal 10 November 2014 Pemerintah kabupaten polewali mandar melakukan sebuah sosialisasi melalui Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah membuat sebuah sosialisasi mengenai kebijakan pengembangan e-government, dasar hukum dari kegiatan tersebut antara lain Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka e-Government dan Peraturan bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Kelola e-Government. Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut diadakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia untuk menjamin tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis data dan informasi yang valid dan up to date serta meningkatkan kinerja aparatur yang terukur dan akuntabel.

Dinas Perhubungan dan Kominfo melakukan pendampingan terhadap pengembangan rancang bangun system informasi Satuan Kerja, melaukan integrasi terhadap Sistem Informasi yang ada untuk menjamin terpenuhinya standar baku pengelolaan dta dan informasi Pemerintah Daerah. www.Polmankab.go.id merupakan situs resmi Pemerintah Daerah dan website SKPD harus menggunakan subdomain website pemerintah daerah.

Adapun Sistem Informasi Management yang telah dikembangkan di Polewali Mandar saat ini :

SKPD	Aplikasi / system Informasi	Status
Secretariat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - e-Procurement - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Media Informasi Electronic Kabupaten Polewali Mandar 	Aplikasi online pusat SIM online Pemda Aplikasi touchscreen Pemda
BKDD	<ul style="list-style-type: none"> - SIMPEG - Sidik jari online - SAPK 	Online Pemda Online Pemda Aplikasi Online Pusat
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - System Informasi 	Aplikasi Online

	Kesehatan	Pusat
RSUD Polewali	- SIM Rumah Sakit	Online Pemda
Dinas Pendidikan	- Dapodik Dikmen - Dapodik Dikdas	Aplikasi Online Pusat
Dinas Pertanian Peternakan	- SIM Kesehatan Hewan - SIM Harga Pasar Hasil Pertanian	Online Pusat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	- SIM Administrasi Kependudukan	Aplikasi Online Pusat
BPMPD	- SIM Profil Desa	Aplikasi Online Pusat
BKKBPP	- SIM pelayanan Kontrasepsi - SIM pencatatan Pelaporan(DALLAP) - SIM Kependudukan dan Keluarga	Aplikasi online pusat
Kantor Perpustakaan	Online Publik Acces Catalog	Aplikasi Online Pusat
PDAM	- SMS Gateway, system tranksaksi Virtual	Aplikasi online Pemda(PDAM)

	Account via ATM, system online payment, system baca mter GPS Android	

4.3 Faktor – factor yang mempengaruhi penerapan kebijakan electronic government di kabupaten polewali mandar

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, tidak akan terlepas dari factor – factor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Adapun factor – factor tersebut adalah :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumberdaya yang tidak mencukupi, memadai, serta berkompeten dibidangnya. Kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia tidak aka nada artinya bila tidak dibarengi dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan electronic government, aparat yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya diharapkan memiliki kapasitas terkait dengan electronic government itu sendiri, yaitu pengetahuan tentang

teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat menjadi factor pendukung dan dapat pula menjadi factor penghambat dalam pelaksanaannya.

Peranan dan fungsi setiap aparat untuk mengambil tindakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran harus benar – benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur akan terdorong untuk selalu menjaga sikap dan komitmen dalam melakukan tugas – tugas dan fungsinya secara sungguh – sungguh dan terfokus.

Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar, jumlah aparat yang dimiliki 106 orang, 8 (delapan) orang diantaranya masih berstatus sebagai CPNS. Dari keseluruhan aparat yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar, masih didominasi dengan aparat dengan tingkat pendidikan SMA. Tercatat terdapat 60 (enam puluh orang) aparat lulusan SMA/ sederajat, Diploma / D3 terdapat 10 (sepuluh orang) aparat, Lulusan Strata 1 sebanyak 20 (dua puluh orang), Strata 2 sebanyak 5 (aparat), dan 2 diantaranya Strata 3.

Tabel 4.3.1 Jumlah Aparatur Dinas Perhubungan dan Kominfo Polewali Mandar menurut tingkat pendidikannya.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	SMA / Sederajat	60
	Diploma / D3	10
	Strata 1	20
	Strata 2	5
	Strata 3	2
	Jumlah	97

Sumber : *Dishub dan Kominfo Polewali Mandar*

Menurut Kepala Bagian bidang komunikasi dan Informatika, H.

Sahabuddin, HM,ST,MA.P (wawancara 14 Januari 2015) bahwa :

“Terkait pembekalan skill pegawai, kami sudah mengadakan semacam pelatihan sebelum mereka mulai masuk kerja, kami melatih mereka dengan cara mengenalkan tehnis atau pelaksanaan teknologi tersebut. Antara lain kami prnah mengadakan sosialisasi ICT dan E-gov terhadap pengelola electronic dan operator sarana informatika.”

Penerapan teknologi komunikasi informasi pada pemerintahan dapat dikatakan sebagai hal yang masih baru. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal dalam bidang ini. Permasalahan ketersediaan SDM yang memiliki standar kompetensi dibidang teknologi komunikasi dan informasi adalah lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya.

Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna electronic government merupakan factor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan electronic government. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaan, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, maupun pengembangan standar kompetensi yang diutuhkan dalam pengembangan dan penerapan e-government.

Upaya – upaya yang ditempuh dalam pengembangan SDM untuk mendukung electronic government yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman bahwa pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.
- b) Memanfaatkan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang

bertugas dalam memberikan pelayanan public, maupun pimpinan unit/lembaga.

- d) Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan electronic government melalui sosialisasi atau penjelasan mengenai konsep dan program electronic government, serta contoh keberhasilan pelaksanaan electronic government.
- e) Meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan atau apresiasi kepada seluruh SDM di bidang informasi maupun komunikasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan electronic government.

(sumber: www.depkominfo.co.id)

b. Anggaran

Pengembangan dan penerapan electronic government disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati – hati dan bertanggung jawab agar anggaran

yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif agar dapat menghasilkan daya yang kuat bagi pembentukan egov tersebut. Maka dari itu diperlukan suatu siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, serta pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.

Menurut kepala bidang komunikasi dan informatika, Dishub Kominfo, H. Sahabuddin HM,ST,MA.P. (wawancara 15 januari 2015) bahwa :

“Saat ini anggaran yang diposkan untuk bidang Kominfo masih minim. Kami juga tak dapat menuntut banyak, karena Kantor Kominfo digabung ke Dinas Perhubungan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) sebagai Implementasi penerapan PP 41/2007.”

Bukanlah merupakan sebuah rahasia lagi bahwa kekuatan sumberdaya financial atau anggaran yang dianggarkan pada program electronic government ini merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah program. Masalah ini merupakan hal yang klasik yang sering terjadi dalam menjalankan sebuah program.

c. Kelembagaan

Dalam pengembangan electronic government disetiap pemerintah daerah, dibutuhkan sebuah instansi yang dapat mengkoordinir seluruh aktifitas pengembangannya pada setiap instansi atau SKPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya, tiap instansi atau SKPD memiliki acuan dan tidak keluar dari konsep yang dikembangkan di tiap daerah masing – masing. Untuk menciptakan keterpaduan arahan pengembangan dan mendukung dalam usaha penyelarasan pengembangannya maupun penerapan electronic government daerah dengan pengembangan nasional secara bertahap dan berkesinambungan maka diperlukan suatu kerangka atau pedoman dasar dalam mengembangkan electronic government yang sesuai dan mengacu kepada penerapan electronic government secara nasional.

Secara umum, di tiap pemerintah daerah yang mapan dalam penerapan electronic government telah memiliki kerangka atau pedoman dasar dalam bentuk rencana penerapan electronic government. Kerangka atau pedoman tersebut tersebut dimaksudkan agar implementasi yang dituju bisa berjalan serasi dan seimbang dengan nilai penerapannya. Penyusunan ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan layanan electronic government yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi.

Dari hasil wawancara pada tanggal 17 januari 2015 dengan bapak H. Sahabuddin HM,ST,MA.P. selaku kepala bidang Kominfo, beliau mengatakan bahwa :

“Di Polewali Mandar sendiri belum memiliki Rencana Induk Penerapan electronic government seperti yang telah dilaksanakan pada daerah yang telah matang seperti Kabupaten Jembrana dan DI Yogyakarta, hal ini disebabkan oleh lembaga yang menangani masalah electronic government atau teknologi informasi di polewali mandar ini belum bisa berdiri secara mandiri.”

Dari hasil peninjauan penulis, memang saat ini di polewali mandar instansi yang dapat dikatakan sebagai coordinator penerapan electronic government belum terbentuk secara mandiri. Terlebih lagi sejak bagian Kominfo dimasukkan ke dalam Dinas Perhubungan.

Dalam pendekatan Edward III, sumber daya manusia dan anggaran merupakan indicator dari variable Sumber daya yang merupakan salah satu factor keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Kedua sumber daya tersebut akan meliputi empat komponen yaitu : staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Sementara itu, kelembagaan masuk termasuk ke dalam variable Struktur Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi

dengan baik, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber – sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Oleh karenanya Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan. Terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang terjadi.

d. Kepemimpinan

Dalam hal penerapan maupun pengembangan electronic government dibutuhkan ide – ide serta kemauan yang tinggi dari pemimpin dalam pelaksanaannya. Merancang sebuah langkah yang dapat menjadikan pengembangan electronic government lebih terarah.

Factor kepemimpinan pada umumnya melekat pada mereka yang bertugas atau memiliki posisi sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpinlah untuk mengawal proses pelaksanaan sebuah program hingga meraih keberhasilan.

Kabag Infokom ketika itu, yang kini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata di Polewali Mandar, Bapak Mustari, mengatakan bahwa :

“sebelum bagian infokom ini dilebur ke beberapa instansi, dulu saya pernah merancang sebuah dinas yang khusus untuk menangani teknologi informasi sebagai pendukung dan coordinator pengembangan electronic government di polewali mandar ini namun pada tingkatan legislatif kami mendapat jalan buntu dikarenakan SKPD yang ada sudah terlalu gemuk.”
(wawancara 20 januari 2015).

Adanya kemauan untuk merancang sebuah instansi yang mandiri mengenai teknologi informasi, merupakan hal yang positif dan dapat melancarkan pengembangan electronic government. Selain dapat menghasilkan rencana strategis, pengalokasian anggaran pun dapat lebih mendukung.

Senada dengan hal tersebut, bapak H. Sahabuddin HM,ST,MA.P.Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, Dishub Kominfo, mengatakan bahwa :

“Rancangan tersebut akan kembali kami usulkan kepada Bapak Bupati lagi karena memang hal ini sangat penting semoga mendapat celah.”

Adanya kemauan yang kuat dari pihak – pihak terkait merupakan cerminan sebuah komitmen untuk menyukkseskan penerapan electronic government kearah yang lebih baik. Namun, hal

tersebut tidak selalu sejalan dengan apa yang diharapkan. Sehingga akan butuh proses yang lama dan panjang untuk mengoptimalkannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa :

1. Penerapan kebijakan electronic government di polewali mandar mulai dicanangkan pada tahun 2006 namun seiring berjalannya waktu mengalami banyak kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor namun hal tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kabupaten polewali mandar dalam memajukan teknologi ke arah yang lebih baik ini dibuktikan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Electronic Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Adanya peraturan bupati tersebut dapat saya simpulkan bahwa inisiasi pemerintah daerah dalam menerapkan electronic government sudah berjalan namun masih perlu perencanaan yang lebih matang. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan, penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar masih berada pada tahap Publish. Pada tahapan ini telah terjadi komunikasi satu arah dimana pemerintah mempublikasikan berbagai

data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

2. Dari pemaparan faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

- a) Sumber daya manusia dalam hal ini aparat yang secara umum belum memiliki kapasitas terkait teknologi informasi dalam pengembangan electronic government
- b) Anggaran dalam pembiayaan teknologi informasi terkait pengembangan electronic government di polewali mandar tergolong masih minim,
- c) Kelembagaan dalam hal ini belum menyatunya dan belum berdiri sendirinya bidang – bidang yang menangani electronic government di Kabupaten Polewali Mandar mengakibatkan perencanaan dalam pengembangan electronic government tidak terarah.
- d) Kepemimpinan dalam hal ini sebagai pendukung dalam penerapan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar.

5.2 SARAN

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparat pemerintah perlu ditingkatkan dalam bidang teknologi informasi, sekaitan dengan penerapan maupun pengembangan Electronic Government di Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan penuh komitmen.
- b) Sebaiknya bidang – bidang yang menangani teknologi informasi dan pengembangan electronic government di Kabupaten Polewali Mandar disatukan dan dijadikan dinas tersendiri, sehingga perkembangan dari electronic sendiri dapat terarah dengan baik dan anggaran pun dapat lebih terencana.
- c) Guna menjadikan penerapan electronic government lebih berkembang Pemerintah Daerah maupun Instansi yang menangani electronic government memberikan sosialisasi maupun melaksanakan kegiatan seminar atau semacamnya agar aparaturnya maupun jajaran pelaksana dan tata kelola electronic government dapat lebih berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Prof. Dr. Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.

Bandung : Alfabeta

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi

Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media

Drs, AG.Subarsono. 2010. Analaisis kebijakan public. Yogyakarta : pustaka

pelajar

Diana Saco. 2002. *Cybering Democracy: Public Space and The Internet*.

Indrajit, Richardus Eko., Rudianto, Dudi. dan Zainudin, Akbar. *Electronic*

Governement In Action

L, Muhadam.2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta: Rajawali Pers

I.Richardus Eko 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan*

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi :

Yogyakarta.

I.Richardus Eko, Dkk 2005. *e-Government In Action “Ragam Kasus*

Implementasi Sukses Diberbagai Belahan Dunia. Andi : Yogyakarta.

Edwin Arief Sosiawan, Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia, Seminar Nasional Informatika, ISSN : 1979-2328, UPN Veteran, Yogyakarta, 2008.

Perundang-undangan :

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 *tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*

Peraturan Bupati Polewali mandar Nomor 26 Tahun 2014 *tentang Tata Kelola E- government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar*

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 *tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.*

WEBSITE :

sumber : http://wilis.himatif.or.id/detail_download.php?action=detail&id=87

J Surat Djumadal, <http://www.depkoinfo.go.id/download/IT-DIYogya.pdf>,)

MCN Blog Manfaat dan Kelemahan e-Government.htm

<http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>

<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-analisis.html>

http://mustarimula.blogspot.com/2013/10/percepatan-penerapan-e-government_20.html

<http://mustarimula.blogspot.com/2005/06/dari-pdik-ke-infokom.html>

http://www.academia.edu/2901110/Penerapan_Electronic_Government_Dalam_Pelayanan_Publik_Di_Era_Otonomi_Daerah

<http://teknologi.kompasiana.com/internet/2012/07/30/e-government-system-dalam-pelayanan-publik-481875.html>

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>